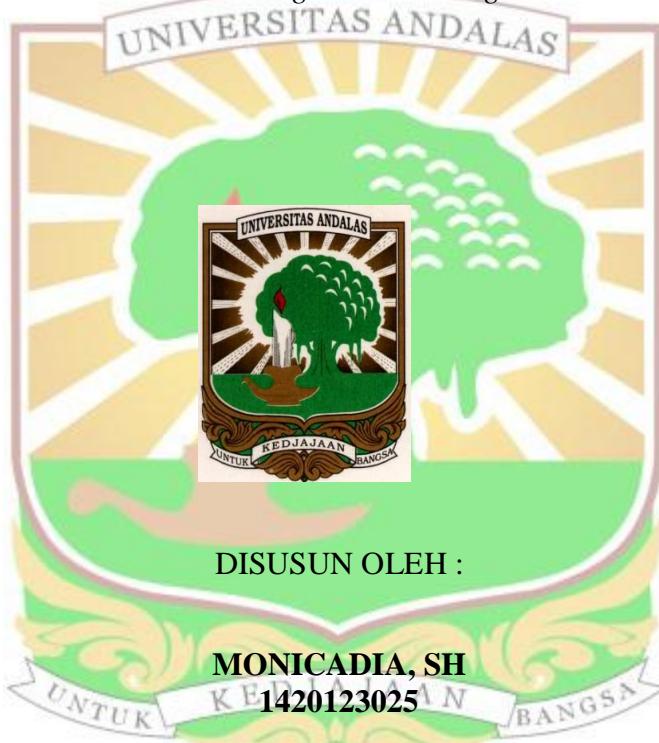


**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
DENGAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DISAHKAN OLEH
NOTARIS**

(Studi Putusan Nomor 54/Pdt.G/2014/PN Pdg)

TESIS

*Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan Mencapai Gelar
Magister Kenotariatan Program Studi Magister Kenotariatan*



Pembimbing :

Dr. Azmi Fendri, SH.,M.Kn
Dr. Khairani, SH., MH

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018**

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DENGAN AKTA DI BAWAH
TANGAN YANG DISAHKAN OLEH NOTARIS**

(Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pdt.G/2014/PN Pdg)

ABSTRAK

**(MONICADIA, 1420123025, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas
Padang, 91 hlm)**

Notaris berwenang melakukan pengesahan terhadap surat di bawah tangan (legalisasi). Proses legalisasi adalah surat yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak di hadapan notaris dan notaris mendaftarkan akta tersebut kedalam buku khusus, sebagai contoh perjanjian pengikatan jual beli. Permasalahan dalam penulisan ini adalah 1)Apa yang melatarbelakangi terjadinya perkara Putusan Nomor 54 /Pdt.G/2014/PN.Pdg?2)Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dan disahkan oleh notaris dalam perkara Putusan Nomor 54 /Pdt.G/2014/PN.Pdg?3)Apa Akibat Hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang disahkan oleh Notaris setelah keluar Putusan Hakim Nomor 54 /Pdt.G/2014/PN.Pdg? Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif empiris. Hasil penelitian 1)Latar belakang terjadinya perkara Putusan Nomor 54 /Pdt.G/2014/PN.Pdg adalah Tergugat I tidak melaksanakan pembayaran Pelunasan jual beli tanah milik Penggugat tersebut diatas, baik pembayaran termijn kedua dan Termijn ketiga sehingga menimbulkan kerugian Penggugat, kerugian tersebut diantaranya Penggugat tidak dapat memanfaatkan uang penjualan tanah tersebut secara optimal, Penggugat telah berusaha terus-menerus untuk menempuh jalan damai guna mencari jalan penyelesaian tetapi Tergugat I selalu berusaha untuk berkelit sehingga tidak menemui solusi penyelesaiannya 2) Pertimbangan hakim terhadap perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dan disahkan oleh notaris dalam perkara Putusan Nomor 54 /Pdt.G/2014/PN.Pdg adalah objek PPJB adalah sebidang tanah yang telah bersertifikat harus diadakan pemeriksaan setempat oleh Majelis, Dinas TRTB tidak mengeluarkan izin untuk lokasi perumahan atas tanah HM No.4065/Balai gadang tersebut dengan alasan bahwa ternyata tanah tersebut terletak tepat diatas tanah yang merupakan rencana jalan atau dalam areal rencana jalan lingkar timur Kota Padang., 3) Akibat Hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang disahkan oleh Notaris setelah keluar Putusan Hakim Nomor 54 /Pdt.G/2014/PN.Pdg adalah tidak jelas atau tidak ada penyelesaian karena gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak diterima, tetapi kalau dikaji secara hukum perjanjian pengikatan jual beli batal.

Kata Kunci : Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akta dibawah tangan dan Notaris.

**YURIDIS ANALYSIS OF BUYER SELLING BUYING AGREEMENT WITH ACTION BELOW
HAND BROKE BY NOTARIS**
(Study Case Decision Number 54/Pdt.G/2014/PN Pdg)

ABSTRACT

**(MONICADIA, 1420123025, Master Program of Kenotariatan University of Andalas
Padang)**

Notary is authorized to authorize the letter under tanagn (legalization). The legalization process is a letter made under the hand signed by the parties before the Notary and the notary register the deed into a special book, for example a binding sale and purchase agreement. The author is interested in discuss1) What is behind the occurrence of the case Decision Number 54 /Pdt.G/2014/PN.Pdg? 2)How the judge's consideration of the sale and purchase agreement binding made and approved by the notary in the case Decision Number 54 /Pdt.G/2014 /PN.Pdg? The research method used is the method of juridical normative empirical approach. The result of the research 1) The background of the occurrence of the Decision Number 54 /Pdt.G/2014/PN.Pdg is that Defendant I did not carry out the payment of the Plaintiff's land sale and purchase of the above land, both the second term and the third Termijn payment, causing such a large loss Plaintiffs, such losses include the Plaintiff can not utilize the land sale money optimally, the Plaintiff has sought constantly to pursue the path of peace to find a way of settlement but Defendant I always tried to dodge so as not to meet common ground, 2) Judge's consideration of the binding agreement Sale and purchase made and approved by a notary in the case of Decision Number 54 /Pdt.G/2014/PN.Pdg is the object of PPJB is a plot of land that has been certified shall be held a local examination by the Assembly, the TRTB Service does not issue permits for the location of housing on land SHM .No.4065 / Balai gadang with the reason that terny Or the land is located just above the ground which is the plan of the road or in the area of the eastern ring road of the city of Padang. This is contrary to the IPPT issued by the Land Office of Padang City and the Sale and Purchase of Land of SHM.No.4065 / Balai Gadang has been declared void in accordance with the provisions of Article 5 of the Agreement dated September 13, 2013, that both parties agree to the costs incurred in The process of reversing the name of the land certificate either on a Notary which makes the deed or administrative process in the Land Affairs office of Padang city. Therefore, please punish the plaintiff for reconstruction and defendant to pay as much (50% each) the costs incurred in the process behind the name SHM.No.4065 / Balai Gadang

Keywords : Binding Agreement Of Sale Purchase, Deed Under The Hand And Notary Public.

